

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah permasalahan di Sungai Mekong dan usaha *Mekong River Commission* dalam meningkatkan kerjasama dengan Tiongkok, permasalahan yang terjadi di Sungai Mekong diharapkan dengan adanya *Mekong River Commission* bisa mengantisipasi permasalahan yang terjadi.

A. Latar Belakang Masalah

Mekong River Commission atau Komisi Sungai Mekong merupakan organisasi regional antar pemerintah Thailand, Laos, Kamboja dan Vietnam untuk berkerjasama dalam mengelola sumber daya air bersama dan pembangunan berkelanjutan Sungai Mekong yang saling menguntungkan. Dibentuk pada tanggal 5 April 1995 di Chiang Rai, Thailand. Negara pendiri *Mekong River Commission*, antara lain Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam dengan memiliki status sebagai anggota. Sedangkan pada tahun 1996 Tiongkok dan Myanmar menjadi mitradialog *Mekong River Commission* hingga saat ini.¹

Sungai Mekong adalah salah satu sungai terpanjang di dunia. Sungai terpanjang ke 7 di Asia Tenggara dari deretan sungai terpanjang di Asia, dan urutan ke 12 dari deretan sungai terpanjang di dunia. Sungai Mekong memiliki panjang sekitar 2.700 mil atau 4.350 km. Sungai Mekong mengalir dari pegunungan Himalayan yang berada di daerah Tibet dan provinsi Yunnan, Tiongkok, mengalir menuju Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan bermuara ditimur Vietnam yaitu Laut China Selatan.² Sungai Mekong memiliki banyak manfaat bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya.

¹ Mekong River Commission, About MRC diakses dari <http://www.mrcmekong.org/about-mrc/> pada tanggal 24 Maret 2019

² Gilbert F. White Jeffrey W. Jacobs Lewis Owen, Mekong River diakses dari <https://www.britannica.com/place/Mekong-River> pada tanggal 10 Februari 2019

Permasalahan pada sungai Mekong terjadi karena adanya kepetingan yang terjadi pada sungai Mekong. Berawal dari alokasi atau pengalihan aliran air oleh pemerintah Thailand dari Sungai Mekong, Permasalahan tersebut menjadi permasalahan utama pada sungai Mekong yang terjadi pada akhir tahun 1980an. Dalam hal ini pemerintah Thailand memiliki kepentingan untuk mengembangkan wilayah yang tertinggal dan terpinggirkan yaitu, Isaan. Berada pada wilayah bagian timur laut dari Bangkok menjadikan daerah tersebut kurangnya .³ Tidak hanya demikian pengalihan air dari sungai Mekong juga untuk menjaga pasokan air ke Bangkok.⁴ Oleh karena itu, pemerintah Thailand merencanakan sebuah proyek irigasi besar di wilayah Isaan untuk mengembangkan daerah tersebut. Akan tetapi, Pejabat bidang perairan Vietnam khawatir dengan rencana Thailand karena pengalihan air pada musim kemarau Sungai Mekong berpotensi merugikan pertanian Vietnam di Delta Mekong.⁵ Vietnam sangat menentang rencana pengalihan air Thailand, sebagian dikarenakan kecurigaan Vietnam bahwa pengalihan air tersebut membatasi aliran air Mekong dan akan menghalangi peningkatan Vietnam dalam kompetisi ekspor beras.⁶ Laos juga khawatir dengan proyek pengalihan air tersebut karena akan berpotensi menimbulkan masalah ekologi serta mengganggu aktifitas di hilir sungai Mekong, terutama pelayaran yang penting bagi Laos dan secara cepat akan mempengaruhi akses air pada saat musim kemarau tiba.⁷ Kamboja juga khawatir akan

³ Kyungmee Kim, *Sustainable Development in Transboundary Water Resource Management : A Case Study of the Mekong River Basin*, 2011, hal 3

⁴ Susanne Schmeier, *Regional Cooperation Efforts in the Mekong River Basin: Mitigating river related security threats and promoting regional development*, *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, Vol. 2, No. 2 2009, hal 35

⁵ Greg Browder & Leonard Ortolano, *The Evolution of an International Water Resources Management : Regime in the Mekong River Basin*, *Natural Resources Journal*, Vol. 40, No. 3, 2000, hal 512

⁶ S.Tefft, *Southeast Asians Face off Over Mekong Dam Plan*, *Christian Science Monitor*, Vol.83, 1991,hal 123

⁷ Op.Cit, Greg Browder & Leonard Ortolano, hal 517

rencana pemerintah Thailand, selain lokasi yang berdekatan, Proyek tersebut dikhawatirkan akan mengganggu Pertanian dan Perikanan dikawasan Kamboja. Karena Pertanian dan Perikanan merupakan penghasil utama yang dimiliki negara Kamboja.⁸

Sungai Mekong telah menimbulkan masalah yang rumit mulai dari keberadaannya dalam berbagi pemanfaatan air dan dampaknya terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Ketergantungan tinggi antara negara riparian⁹, pentingnya sungai untuk pembangunan ekonomi sosial mereka, dan munculnya masalah tindakan kolektif di aliran sungai, hal ini sering dianggap menimbulkan konflik antara negara-negara riparian. Karena telah ditunjukkan sebelumnya bahwa dalam aliran sungai Mekong terdapat struktur kepentingan dan strategi yang kompleks. Sungai juga semakin penting untuk keperluan industri dan rumah tangga, terutama dalam industrialisasi dan urbanisasi negara riparian seperti Tiongkok, Thailand Dan Vietnam. Pembangkit Listrik Tenaga Air (*hydropower*) juga merupakan yang paling penting untuk menyediakan listrik bagi negara riparian. Selanjutnya, Sungai Mekong merupakan jalur transportasi penting, terutama di negara-negara tepi sungai yang transportasi jalan daratnya seperti kereta api masih kurang cukup berkembang seperti Laos dan Kamboja, dimana ibu kota kedua negara tersebut berbatasan langsung dengan Sungai Mekong.¹⁰

Salah satu negara yang di aliri Sungai Mekong yaitu Tiongkok, Tiongkok juga sebagai salah satu negara yang sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang besar. Hal ini membutuhkan banyak sekali sumber daya energi untuk menyokong industri dalam negerinya agar tetap berjalan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, kebutuhan listrik nasional Tiongkok juga mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu upaya Tiongkok untuk mendapatkan sumber daya energi adalah dengan membangun sejumlah bendungan di Sungai Mekong. Pembangunan PLTA melalui pembendungan

⁸ Op.Cit,Susanne Schmeier, hal 37

⁹ Negara riparian adalah negara yang berada di sepanjang lintasan Sungai Mekong atau negara yang berada di tepi aliran sungai Mekong.

¹⁰ Ibid

sungai diperkirakan dapat memenuhi 70% kebutuhan Tiongkok akan listrik.¹¹ Oleh karena itu pembangunan PLTA sangat penting bagi Tiongkok



Gambar 1. Peta Aliran Sungai Mekong

Sumber : www.mrcmekong.org, 2018

¹¹ Joshua D. Freeman. Taming the Mekong: The Possibilities and Pitfalls of a Mekong Basin Joint Energy Development Agreement, *Asian-Pacific Law & Policy Journal*, vol. 10, no. 2, 2009, hal. 453.

Kebutuhan energi menjadi alasan utama pemanfaatan tenaga air oleh Tiongkok di Sungai Mekong dan melalui pembangunan sejumlah PLTA di sepanjang aliran sungai maka Tiongkok dapat menyimpan dan menggunakan energi listrik sesuai dengan kebutuhan. Bendungan pertama dibangun pada tahun 1980 (dimulai dengan bendungan Manwan pada tahun 1984, beroperasi pada tahun 1993), kegiatan tenaga air meningkat sangat besar beberapa tahun kemudian. Pembangunan yang dilakukan Tiongkok pada awal 1980 hingga 1993 dilakukan secara sepihak karena dilakukan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan negara-negara riparian lainnya, dan bahkan negara riparian yang berada di hilir Sungai Mekong tidak menyadari dan mengetahui rencana pembangunan PLTA Tiongkok.¹² Pada tahun 1993, dampak dari pembangunan PLTA bendungan pertama yang diberi nama bendungan Manwan terhadap level air mulai dirasakan negara – negara yang berada di hilir Mekong. Setahun setelah bendungan itu selesai dibangun, level air yang semakin rendah telah menghambat pelayaran di kawasan *the Golden Triangle*, dan ini merupakan rekor level air terendah. Sehingga aktivitas Tiongkok ini telah membuat masalah semakin kompleks di perairan sungai Mekong.

Sungai Mekong merupakan persoalan utama yang harus diambil serius oleh negara-negara riparian untuk mencegah terjadinya konflik antar negara di kawasan Sungai Mekong. Pada tahun 1995, negara-negara riparian sungai Mekong membentuk organisasi yang bernama “*Mekong River Commission*” atau Komisi Sungai Mekong dengan membuat perjanjian kerjasama yang disebut “*Agreement on Cooperation for the Sustainable Development of the Mekong River Basin*” yang ditanda tangani oleh pemerintah Kamboja, Laos, Thailand dan Vietnam untuk bekerjasama dalam cara yang konstruktif dan saling menguntungkan bagi pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan, pelestarian dan pengelolaan Sungai Mekong dan sumber daya terkait lainnya. Dengan adanya Mekong River Commission permasalahan yang ada di Sungai Mekong bisa diatasi.

¹² Evelyn Goh, *China in the Mekong River Basin : The Regional Security Implications of Resource Development on the Lancang Jiang*, 2004, hal 4

Permasalahan yang terjadi pada Sungai Mekong bagian atas (*upstream*) dengan negara Tiongkok dan Myanmar dengan Sungai Mekong bagian bawah (*downstream*) yang tergabung dengan Mekong River Commission yaitu, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam harus ditangani dengan serius. Jika tidak terjadi permasalahan yang berkepanjangan antara negara-negara yang di aliri Sungai Mekong.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana strategi Mekong *River Commission* dalam meningkatkan kerjasama dengan Tiongkok ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Mekong River Commission dalam meningkatkan kerjasama dengan Tiongkok.

D. Kerangka Konseptual

Sehubungan dengan permasalahan yang ada, penulis mencoba menjawab pertanyaan jawaban melalui konsep berikut :

1. Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan seperangkat aturan yang melembaga yang mengatur tindakan negara dalam bidang tertentu berlandaskan persetujuan dasar bersama. Kaum liberal institusional menyatakan bahwa Institusi internasional mampu membantu memajukan kerjasama di antara negara-negara untuk menuju tercapainya tujuan bersama. Contohnya adalah ASEAN. Negara-negara Asia Tenggara yang bekerjasama secara intensif sehingga mereka memiliki pasar tunggal bersama dan diatur secara bersama untuk meningkatkan perekonomian bersama.¹³

Kegiatan organisasi internasional terdapat hubungan eksternal maupun internal. Hubungan internal yang dimaksud adalah hubungan dengan negara-negara

¹³ Jackson, R., & Sorensen, G, Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Hal. 157.

anggotanya sendiri sedangkan hubungan eksternalnya merupakan hubungan dengan organisasi internasional lainnya, dengan bukan negara anggota atau dengan subjek internasional lain. Menurut Mohd. Burhan Tsani organisasi internasional memiliki tujuan yang dapat dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum organisasi internasional antara lain :

- a. Mengurus serta meningkatkan kesejahteraan dunia maupun negara anggota, melalui berbagai cara yang dipilih dan sesuai dengan organisasi internasional yang bersangkutan
- b. Mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia, serta keamanan internasional, dengan berbagai variasi cara yang dipilih oleh organisasi internasional yang bersangkutan diantara cara dan upaya yang disediakan hukum internasional.

Tujuan khususnya adalah maksud negara-negara anggota untuk menjadikan organisasi internasional sebagai wadah, forum atau alat untuk mencapai tujuan bersama sesuai tujuan yang disepakati bersama.¹⁴

Menurut Harold K. Jacobson yang terdapat di didalam bukunya Sugito yang berjudul organisasi internasional; aktor dan instrumen dalam hubungan internasional menyebutkan bahwa terdapat 5 pokok fungsi dari organisasi internasional yaitu fungsi informasi, fungsi normatif, fungsi pembuatan peraturan, fungsi pengawasan peraturan, dan fungsi operasional.¹⁵ Pada umumnya, setiap organisasi internasional baik *intergovernmental organizations* (IGOs) maupun *non-governmental organizations* (NGOs) memiliki fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya

Fungsi informasi adalah fungsi organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk pengumpulan, penganalisaan, pertukaran dan desiminasi data dan

¹⁴ Tsani, M. B, Hukum dan Hubungan internasional. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,1990

¹⁵ Sugito, Organisasi Internasional Aktor dan istrumen dalam Hubungan Internasional. Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta. 2016, Hal. 86.

informasi. Untuk fungsi normatifnya adalah pendefinisian dan pendeklarasian suatu norma standar sedangkan fungsi pembuatan peraturannya hampir sama dengan yang normatif tetapi lebih mengikat secara hukum. Kemudian yang dimaksud fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap pemberlakuan aturannya. Didalam bukunya Sugito yang berjudul organisasi internasionala memberikan contoh tentang fungsi pengawasan peraturan yaitu adanya IAEA sebagai badan pengawas untuk mengawasi *Treaty of non proliferation of Nuclear Weapons*. Terakhir, fungsi operasional adalah meliputi penggunaan sumber daya organisasi misalkan penggunaan bantuan, keuangan, teknis, ataupun kekuatan militer.¹⁶

Konstatinos D. Magliveras yang terdapat dalam jurnal Edward Elgar yang berjudul *Research Handbook on the Law of International Organization* berpendapat bahwa suatu organisasi internasional memiliki aturan mengenai penerimaan anggota baru yang dapat menjadi tiga pokok, antara lain:

- a. Suatu organisasi internasional akan menerima suatu anggota baru jika organisasi tersebut membuka atau menyatakan bahwa organisasi yang mereka akui menerima anggota baru
- b. Menetapkan kriteria, kualifikasi dan kondisi yang harus dimiliki atau dipenuhi sebagai calon anggota
- c. Memiliki prosedur yang harus dimiliki suatu organisasi internasional untuk menerima anggota baru

Dengan demikian anggota pendiri organisasi internasional memiliki kebijakan untuk menentukan apakah organisasi internasional mereka apakah bersifat tertutup atau terbuka untuk anggota baru, atau dalam hal lain apakah seberapa mudah atau sulitnya bergabung suatu institusi tersebut.¹⁷

¹⁶ ibid

¹⁷ Edward Elgar, *Research Handbook on the Law of International Organization*. Nothampton, Amerika Serikat : William Prat House, 2011, Hal 86

Dalam hal ini, *Mekong River Commission* sebagai organisasi internasional adalah menciptakan Kawasan Aliran Sungai Mekong yang sehat, menghasilkan status ekologis yang baik dan mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Hal tersebut merupakan kepentingan bersama negara-negara anggota *Mekong River Commission*. Sebagai organisasi internasional *Mekong River Commission* melalui fungsinya mendukung untuk bekerja secara bersama-sama dalam cara yang konstruktif dan saling menguntungkan demi pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan, pelestarian dan pengelolaan Sungai Mekong dan sumber daya terkait lainnya. Permasalahan PLTA yang diinisiasi oleh Tiongkok menimbulkan suatu masalah dimana menyebabkan berkurangnya debit air dan mengganggu kehidupan di sekitar sungai Mekong sehingga menyebabkan anggota *Mekong River Commission* merasa dirugikan dan menyebabkan tujuan *Mekong River Commission* belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu *Mekong River Commission* berupaya untuk mengajak Tiongkok untuk meningkatkan kerjasama agar kepentingan *Mekong River Commission* tercapai dalam menciptakan Kawasan Aliran Sungai Mekong yang sehat, menghasilkan status ekologis yang baik dan mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

2. Rezim Internasional

Rezim Internasional adalah sebuah instrumen yang dibentuk oleh negara dan dianggap efektif untuk membantu mencapai suatu kepentingan. Rezim juga dianggap menjadi penentu arah urusan negara, karena pada implementasinya, rezim mengkaji isu area dalam skala regional atau global yang bersifat lebih spesifik berdasarkan prinsip self-help. Di dalam rezim internasional terdapat tiga perspektif utama yaitu neo-liberalisme, realisme, dan kognitivisme.

Tabel 1. School of thoughts in the study International Regime.¹⁸

	<i>Realism</i>	<i>Neo-Liberalism</i>	<i>Cognitivism</i>
<i>Central Variable</i>	<i>Power</i>	<i>Interest</i>	<i>Knowlegde</i>
<i>Meta-theoretical orientation</i>	<i>Weak</i>	<i>Medium</i>	<i>Strong</i>
<i>Behavior model</i>	<i>Concerned with relative gains</i>	<i>Absolute gain maximize</i>	<i>Role - Player</i>

Oleh Andreas Hanseclever, dalam mengkaji rezim internasional terdapat 3 perspektif yang terdiri dari realis, neoliberalis dan kognitivis. Teori rezim internasional realism menekankan pada kapasitas power sebagai penjelasan sentral variabel dan hal utama bagi negara dalam aspek distribusi kerjasama dan rezim. Power dijadikan alasan utama dalam menjelaskan rezim serta dapat menjelaskan terkait dengan tindakan-tindakan negara, terutama terhadap pembentukan aturan dalam rezim internasional. Negara dominan muncul salah satu kontributor dalam pembentukan rezim, karena negara hegemon percaya bahwa adanya pengaturan dan kontrol dari negara hegemon dapat menjaga keefektivan dalam rezim pada isu-isu tertentu. Adanya pendekatan *power* sebagai fokus utama, bukan hanya bergantung pada hasil dari *absolute gains* saja, akan tetapi negara juga menyadari keberadaan *relative gains*. Realisme menganggap bahwa negara sebagai aktor yang mempertimbangkan apa yang dilakukan oleh kompetitornya dimana fokus utama mereka adalah kelangsungan hidup dan kemandirian bagi negaranya. Sebagai konsekuensinya, kerjasama dengan basis peraturan akan lebih sulit untuk dilakukan. Realis berfokus pada power

¹⁸ Hasenclever Andreas, Peter Mayer, Volker Rittberger, “Theories of International Regimes” Cambridge University Press, hal 6

yang mengatur rezim. Realis ragu apabila tidak terdapat suatu negara hegemon yang mengatur rezim, stabilitas dalam rezim tersebut akan sulit dicapai. Dengan adanya rezim yang kuat, efisiensi, stabilitas dan hirarki dapat diatur secara maksimal. Kaum realis berfokus pada power atau kekuasaan, dimana kaum realis mengatakan bahwa distribusi sumber kekuasaan diantara para aktor hubungan internasional berperan sangat besar dalam menentukan efektivitas rezim internasional. Kaum realis meyakini bahwa negara hegemoni berperan sangat besar dalam menentukan efektivitas suatu rezim internasional.

Teori rezim internasional neoliberal atau berbasis kepentingan telah sangat luar biasa berpengaruh dalam dekade terakhir dimana menekankan pada kepentingan sebagai penjelasan sentral variabel dan hal utama hanya peduli untuk keuntungan (absolut) mereka sendiri. Kepentingan dijadikan alasan utama dalam menjelaskan rezim serta dapat menjelaskan terkait dengan tindakan-tindakan negara, terutama dalam membantu negara-negara untuk mewujudkan kepentingan bersama. Teori rezim internasional neoliberal memilih pendekatan kepentingan sebagai fokus utama, dimana neoliberal menyadari pada hasil yang *absolute gains maximize*. Neoliberal menganggap bahwa negara sebagai aktor yang mempertimbangkan apa yang dilakukan oleh kompetitornya dimana fokus utama mereka adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama. Dengan adanya kerjasama dengan basis peraturan maka akan lebih mudah untuk mengoordinasikan negara sedemikian rupa sehingga negara dapat menghindari hasil yang kurang optimal secara keseluruhan, dan negara-negara dapat ditunjukkan untuk memiliki kepentingan dalam mempertahankan rejim-rejim yang ada bahkan ketika faktor-faktor yang membawa mereka menjadi tidak lagi beroperasi dilakukan dikarenakan atas dasar kepentingan.

Teori rezim internasional *cognitivism* atau teori berbasis pengetahuan dari rezim-rezim telah memusatkan perhatian pada asal-usul kepentingan sebagaimana yang dirasakan oleh negara-negara dan, dalam hubungan ini, telah

menekankan peran kausal serta gagasan-gagasan normatif. Tetapi kritik dari beberapa ahli kognitif berjalan lebih dalam, menunjukkan bahwa institusionalisme yang diinformasikan oleh perspektif pilihan sosiologis dan bukan rasional sesuai untuk sistem internasional juga. Dengan demikian, "cognitivists kuat" telah menunjukkan bahwa teori-teori berbasis-minat telah memberikan gambaran yang terpotong tentang sumber-sumber ketahanan rezim dengan tidak memperhitungkan secara memadai dampak dari praktik-praktik yang dilembagakan pada identitas para aktor internasional. Setidaknya dalam banyak situasi, disarankan, negara lebih dipahami sebagai pemain peran daripada sebagai pemaksimal utilitas. Akirbatnya, teori-teori berbasis pengetahuan dari rezim cenderung merangkul suatu institusionalisme yang jauh lebih jelas daripada yang kita temukan baik dalam neoliberalisme atau realisme.

Dalam hal ini, teori rezim internasional neoliberalis memiliki tiga point penting yang mana teori rezim internasional neoliberalis menyatakan pendekatan kepentingan sebagai focus utama, seperti yang dilakukan oleh *Mekong River Commision*. Kepentingan yang dimaksudkan dalam hal ini dimana *Mekong River Commision* berusaha untuk mengajak Tiongkok untuk menjadi anggotanya dikarenakan aktivitas Tiongkok membuat permasalahan semakin kompleks dari dampak pembangunan proyek bendungan di Sungai Mekong. Sesuai peraturan dalam perjanjian Kerjasama dan pengembangan berkelanjutan sungai Mekong dalam bagian Komite Gabungan pasal 24 Fungsi Komite Gabungan menyatakan "Untuk melaksanakan kebijakan dan keputusan Dewan dan tugas-tugas lain yang mungkin ditugaskan oleh Dewan"¹⁹

Hal ini membuat *Mekong River Commision* mempunyai *Meta-theoretical Orientation* yang bisa mengatur jalannya kebijakan yang dilakukan *Mekong River Commision*. Permasalahan yang terjadi di sungai Mekong

¹⁹ Agreement On the Cooperation for the sustainable development of the Mekong River Basin 5 April 1995

akibat pembangunan PLTA oleh Tiongkok menyebabkan berkurangnya debit air dan mengganggu kehidupan di sekitar sungai Mekong, ambisi yang dilakukan Tiongkok disebabkan kepentingan yang berupa *hydropower* yang dihasilkan oleh PLTA. Jika permasalahan tersebut tidak segera ditangani bisa menimbulkan pemasalahan yang semakin lebih parah akan dirasakan oleh anggota *Mekong River Commision*. Dalam teori rezim internasional neoliberalis menyatakan pendekatan kepentingan sebagai focus utama, seperti yang dilakukan *Mekong River Commision* dalam menjalankan tujuannya, Sejauh ini *Mekong River Commision* telah berupaya untuk mengajak Tiongkok dalam menyelesaikan permasalahan ini untuk mencapai kepentingan bersama yang maksimal

E. Hipotesis

Penulis memaparkan hipotesis mengenai Bagaimana strategi *Mekong River Commision* dalam meningkatkan kerjasama dengan Tiongkok, yaitu :

Mekong River Commision sebagai organisasi internasional menjadikan Tiongkok sebagai mitra dialognya.

F. Batasan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis membahas tentang strategi Mekong River Commission dalam meningkatkan kerjasama dengan Tiongkok. Penulis juga memberikan batasan dalam penelitian agar lebih spesifik pada kurun waktu 2018.

G. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif. Penulis mengumpulkan data-data menggunakan studi kepustakaan dengan merujuk buku-buku, jurnal, berita, artikel, dan situs resmi yang relevan terhadap strategi *Mekong River Commision* dalam meningkatkan kerjasama dengan Tiongkok.